



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD AMRULLAH**
2. Jabatan : **PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (P2UPD)**
3. NHK : **490081**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/120 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SPM Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.325.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 585.825.000**III. HUTANG** Rp. 193.283.998**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 392.541.002

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.